

EXPOSURE DRAFT

PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

**AKUNTANSI HIBAH PEMERINTAH
DAN PENGUNGKAPAN BANTUAN
PEMERINTAH**

Exposure draft *ini dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*

*Tanggapan atas exposure draft ini diharapkan dapat
diterima paling lambat tanggal 30 Oktober 2010 oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan*



IKATAN AKUNTAN INDONESIA

ED PSAK
No.
61

PERNYATAAN
STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN

AKUNTANSI HIBAH PEMERINTAH DAN
PENGUNGKAPAN BANTUAN PEMERINTAH



Hak cipta © 2010, Ikatan Akuntan Indonesia

Dikeluarkan oleh
Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jalan Sindanglaya No. 1
Menteng
Jakarta 10310
Telp: (021) 3190-4232
Fax : (021) 724-5078
Email: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Juli 2010

Exposure draft ini diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan hanya untuk ditanggapi dan dikomentari. Saran dan masukan untuk menyempurnakan *exposure draft* ini masih dimungkinkan sebelum diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan

Tanggapan tertulis atas draft ini paling lambat diterima pada **30 Oktober 2010**. Tanggapan dikirimkan ke:

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan
Ikatan Akuntan Indonesia
Jl. Sindanglaya No.1,
Menteng,
Jakarta 10310**

Fax: 021 724-5078

E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id

Hak Cipta © 2010 Ikatan Akuntan Indonesia

Exposure Draft (ED) ini dibuat dengan tujuan untuk penyiapan tanggapan dan komentar yang akan dikirimkan ke Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Pengandaan ED ini oleh individu/organisasi/lembaga dianjurkan dan diizinkan untuk penggunaan di atas dan tidak untuk diperjualbelikan.

**Dewan Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia, Jl Sindanglaya No.1, Menteng, Jakarta 10310.
Tel. 62-21 3190-4232, Fax: 62-21 724-5078
E-mail: iai-info@iaiglobal.or.id, dsak@iaiglobal.or.id**

PENGANTAR

Dewan Standar Akuntansi Keuangan telah menyetujui ED PSAK 62: *Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah* dalam rapatnya pada tanggal 17 Juli 2010 untuk disebarluaskan dan ditanggapi oleh perusahaan, regulator, perguruan tinggi, pengurus dan anggota IAI, dan pihak lainnya.

Tanggapan akan sangat berguna jika memaparkan permasalahan secara jelas dan alternatif saran yang didukung dengan alasan.

ED PSAK 61 ini disebarluaskan dalam bentuk buku, sisipan dokumen dalam majalah Akuntan Indonesia, dan situs web IAI: www.iaiglobal.or.id

Jakarta, 17 Juli 2010
Dewan Standar Akuntansi Keuangan

Rosita Uli Sinaga	Ketua
Roy Iman Wirahardja	Wakil Ketua
Etty Retno Wulandari	Anggota
Merliyana Syamsul	Anggota
Meidyah Indreswari	Anggota
Setiyono Miharjo	Anggota
Saptoto Agustomo	Anggota
Jumadi	Anggota
Ferdinand D. Purba	Anggota
Irsan Gunawan	Anggota
Budi Susanto	Anggota
Ludovicus Sensi Wondabio	Anggota
Eddy R. Rasyid	Anggota
Liauw She Jin	Anggota
Sylvia Veronica Siregar	Anggota
Fadilah Kartikasasi	Anggota
G.A. Indira	Anggota
Teguh Supangkat	Anggota

PERMINTAAN TANGGAPAN

Penerbitan ED PSAK 61: *Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah* bertujuan untuk meminta tanggapan atas semua pengaturan dan paragraf dalam ED PSAK 61 tersebut.

Untuk memberikan panduan dalam memberikan tanggapan, berikut ini hal yang diharapkan masukannya:

1. Ketentuan tanggal efektif

Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Penerapan dini diperkenankan.

Apakah anda setuju dengan ketentuan tanggal efektif yang diperkenankan penerapan dini atas PSAK 61?

2. Pengembalian Hibah Pemerintah

Hibah pemerintah yang ternyata harus dibayar kembali, harus diperhitungkan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Pengembalian hibah yang terkait dengan penghasilan harus diperhitungkan terlebih dahulu terhadap setiap saldo kredit yang ditangguhkan yang belum diamortisasi yang terkait dengan hibah. Pada saat pengembalian melebihi saldo kredit yang ditangguhkan, atau tidak ada lagi saldo kredit yang ditangguhkan, pengembalian harus diakui segera dalam laporan laba rugi. Pengembalian hibah yang terkait dengan suatu aset harus diakui dengan meningkatkan nilai tercatat aset atau mengurangi saldo penghasilan tangguhan dengan jumlah yang dibayar kembali. Akumulasi penyusutan tambahan yang seharusnya diakui dalam laporan laba rugi seandainya hibah tidak ada, harus diakui segera dalam laporan laba rugi.

Apakah lazim suatu hibah yang diterima namun karena tidak performace atau persyaratan lebih lanjut tidak terpenuhi sehingga hibah tersebut harus dikembalikan kepada pemerintah?

PERBEDAAN DENGAN IFRSs

ED PSAK 61: *Akuntansi Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah* mengadopsi seluruh pengakuan dalam IAS 20 *Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance* per 1 Januari 2009, kecuali:

1. IAS 20 paragraf 2 (d) tentang ruang lingkup yang tidak termasuk hibah pemerintah dalam IAS 41 *Agriculture*. Paragraf tersebut tidak diadopsi karena IAS 41 belum diadopsi pada saat yang sama dengan adopsi IAS 20.
2. IAS 20 paragraf 41 yang menjadi ED PSAK 61 paragraf 42 tentang tanggal efektif.
3. IAS 20 paragraf 42 dan 43 tentang tanggal efektif bagian IAS 20 yang diamandemen. Paragraf tersebut tidak diadopsi karena tidak relevan.

DAFTAR ISI

	Paragraf
PENDAHULUAN	01 - 06
Ruang lingkup	01 - 02
Definisi.....	03 - 06
HIBAH PEMERINTAH.....	07 - 35
Hibah pemerintah nonmoneter.....	24
Penyajian hibah yang terkait dengan aset.....	25 - 29
Penyajian hibah yang terkait dengan penghasilan ...	30 - 33
Pembayaran kembali hibah pemerintah.....	34 - 35
BANTUAN PEMERINTAH	36 - 39
PENGUNGKAPAN.....	40
KETENTUAN TRANSISI	41
TANGGAL EFEKTIF	42

1 **PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN**
2 **No. 61**

3
4 **AKUNTANSI HIBAH PEMERINTAH DAN**
5 **PENGUNGKAPAN BANTUAN PEMERINTAH**

6
7 *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 61: Akuntansi*
8 *Hibah Pemerintah dan Pengungkapan Bantuan Pemerintah*
9 *terdiri dari paragraf 1- 42. Seluruh paragraf dalam PSAK*
10 *ini memiliki kekuatan mengatur yang sama. Paragraf yang*
11 *dicetak dengan huruf tebal dan miring mengatur prinsip-*
12 *prinsip utama. PSAK 61 harus dibaca dalam konteks*
13 *tujuan pengaturan dan Kerangka Dasar Penyusunan dan*
14 *Penyajian Laporan Keuangan. PSAK 25 (revisi 2009):*
15 **Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi**
16 **dan Kesalahan memberikan dasar untuk memilih dan**
17 **menerapkan kebijakan akuntansi ketika tidak ada panduan**
18 **yang eksplisit. Pernyataan ini tidak wajib diterapkan untuk**
19 **unsur-unsur yang tidak material.**

20
21 **PENDAHULUAN**

22
23 **Ruang Lingkup**

24
25 01. Pernyataan ini diterapkan untuk akuntansi, dan
26 pengungkapan, atas hibah pemerintah dan pengungkapan atas
27 bentuk lain bantuan pemerintah.

28
29 02. Pernyataan ini tidak berhubungan dengan:

- 30 (a) masalah khusus yang timbul dalam akuntansi atas hibah
31 pemerintah pada laporan keuangan yang mencerminkan
32 dampak dari perubahan harga atau informasi tambahan
33 yang memiliki sifat serupa;
34 (b) bantuan pemerintah yang diberikan kepada entitas
35 dalam bentuk manfaat yang tersedia dalam menentukan
36 laba atau rugi kena pajak, atau dalam bentuk manfaat
37 yang ditentukan atau yang terbatas pada dasar liabilitas
38 pajak penghasilan. Misalnya manfaat masa bebas pajak

- 1 penghasilan, kredit pajak investasi, penyisihan atas
2 penyusutan yang dipercepat, dan pengurangan tarif pajak
3 penghasilan; dan
4 (c) partisipasi pemerintah dalam kepemilikan entitas.

5

6 **Definisi**

7

8 *03. Berikut adalah istilah yang digunakan dalam*
9 *Pernyataan ini:*

10

11 ***Bantuan pemerintah** adalah tindakan oleh pemerintah yang*
12 *dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi spesifik*
13 *kepada satu entitas atau beberapa entitas yang memenuhi*
14 *kualifikasi tertentu. Bantuan pemerintah untuk tujuan*
15 *Pernyataan ini tidak mencakup manfaat yang diberikan secara*
16 *tidak langsung melalui tindakan yang mempengaruhi kondisi*
17 *perdagangan umum, seperti penyediaan/atau pembangunan*
18 *infrastruktur di daerah yang sedang berkembang atau*
19 *pemberlakuan batasan perdagangan terhadap pesaing.*

20

21 ***Hibah pemerintah** adalah bantuan oleh pemerintah dalam*
22 *bentuk pemindahan sumber daya kepada entitas sebagai*
23 *imbalan atas kepatuhan entitas di masa lalu atau masa*
24 *depan sesuai dengan kondisi tertentu yang berkaitan dengan*
25 *kegiatan operasi entitas tersebut. Hibah pemerintah tidak*
26 *termasuk jenis bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai*
27 *yang memadai bagi entitas dan transaksi dengan pemerintah*
28 *yang tidak dapat dibedakan dari transaksi perdagangan*
29 *normal entitas.*

30

31 ***Hibah yang terkait dengan aset** adalah hibah pemerintah*
32 *yang kondisi utamanya adalah bahwa entitas yang memenuhi*
33 *syarat harus melakukan pembelian, membangun atau*
34 *membeli aset jangka panjang. Kondisi tambahan mungkin*
35 *juga ditetapkan dengan membatasi jenis atau lokasi aset atau*
36 *periode aset tersebut diperoleh atau dimiliki.*

37

38

1 ***Hibah yang terkait dengan penghasilan adalah hibah***
2 ***pemerintah selain dengan hibah yang terkait dengan aset.***

3
4 ***Nilai wajar adalah jumlah suatu aset dapat dipertukarkan***
5 ***antara pembeli dan penjual yang memahami dan berkeinginan***
6 ***untuk melakukan transaksi wajar.***

7
8 ***Pemerintah mengacu pada pemerintah, instansi***
9 ***pemerintah, dan badan serupa baik lokal, nasional maupun***
10 ***internasional.***

11
12 ***Pinjaman yang dapat dimaafkan (forgivable loans) adalah***
13 ***pinjaman yang mana pemberi pinjaman menyanggupi untuk***
14 ***membebaskan pembayaran kembali tergantung pada kondisi***
15 ***yang ditentukan sebelumnya.***

16
17 04. Bantuan pemerintah memiliki jenis yang bervariasi
18 baik sifat bantuan yang diberikan dan kondisi yang biasanya
19 melekat terhadap bantuan tersebut. Tujuan bantuan tersebut
20 mungkin untuk mendorong entitas untuk memulai suatu
21 tindakan yang tidak biasanya diambil jika bantuan tidak
22 diberikan.

23
24 05. Penerimaan bantuan pemerintah oleh entitas mungkin
25 signifikan untuk penyusunan laporan keuangan dengan dua
26 alasan. Pertama, jika sumber daya telah dialihkan, maka
27 suatu metode akuntansi yang sesuai untuk pengalihan harus
28 ditentukan. Kedua, sangat dibutuhkan untuk memberikan
29 indikasi sejauh mana entitas telah memperoleh manfaat atas
30 bantuan tersebut selama periode pelaporan. Hal ini akan
31 memberikan perbandingan laporan keuangan entitas yang
32 memperoleh bantuan dengan laporan keuangan periode
33 sebelumnya dan dengan laporan keuangan entitas lain.

34
35 06. Hibah pemerintah terkadang disebut dengan nama lain
36 seperti subsidi, tunjangan (*subventions*), atau hadiah.

37
38

1 HIBAH PEMERINTAH

2

3 **07. Hibah pemerintah, termasuk hibah nonmoneter pada**
4 **nilai wajar, tidak boleh diakui sampai terdapat keyakinan**
5 **yang memadai bahwa:**

6 **(a) entitas akan mematuhi kondisi yang melekat pada hibah**
7 **tersebut; dan**

8 **(b) hibah akan diterima.**

9

10 08. Hibah pemerintah tidak diakui sampai terdapat
11 keyakinan yang memadai bahwa entitas akan mematuhi kondisi
12 yang melekat pada hibah tersebut, dan hibah akan diterima.
13 Penerimaan atas hibah tidak dengan sendirinya memberikan
14 bukti yang meyakinkan bahwa kondisi yang melekat pada hibah
15 telah atau akan dipenuhi.

16

17 09. Cara penerimaan hibah tidak berdampak terhadap
18 metode akuntansi yang digunakan dalam kaitannya dengan
19 hibah. Dengan demikian hibah dicatat dengan cara yang
20 sama baik diterima dalam bentuk kas atau sebagai pengurang
21 liabilitas kepada pemerintah.

22

23 10. Pinjaman dari pemerintah yang dapat dimaafkan
24 diperlakukan sebagai hibah pemerintah jika terdapat keyakinan
25 yang memadai bahwa entitas akan memenuhi persyaratan untuk
26 mendapatkan pembebasan pinjaman.

27

28 11. Manfaat atas pinjaman pemerintah yang memiliki
29 tingkat bunga di bawah tingkat bunga pasar diperlakukan
30 sebagai hibah pemerintah. Pinjaman tersebut diakui dan diukur
31 sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2006): *Instrumen Keuangan:*
32 *Pengakuan dan Pengukuran*. Manfaat pinjaman dengan
33 tingkat bunga di bawah tingkat bunga pasar diukur sebagai
34 perbedaan antara nilai tercatat awal pinjaman yang ditentukan
35 sesuai dengan PSAK 55 (revisi 2006) dan jumlah yang
36 diterima. Manfaat tersebut dicatat sesuai dengan Pernyataan
37 ini. Entitas mempertimbangkan kondisi dan kewajiban yang
38 telah, atau harus, dipenuhi ketika mengidentifikasi biaya yang

1 dimaksudkan akan dikompensasikan dengan manfaat dari
2 pinjaman.

3

4 12. Sekali suatu hibah pemerintah diakui setiap aset
5 kontinjensi atau liabilitas kontinjensi yang terkait diberlakukan
6 sesuai dengan PSAK 57 (revisi 2009): *Provisi, Liabilitas*
7 *Kontinjensi dan Aset Kontinjensi*.

8

9 **13. Hibah pemerintah diakui dalam laba rugi dengan**
10 **dasar yang sistematis selama periode entitas mengakui**
11 **sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan**
12 **dikompensasikan dengan hibah.**

13

14 14. Terdapat dua pendekatan umum untuk akuntansi atas
15 hibah pemerintah: pendekatan modal, hibah diakui diluar laba
16 rugi, dan pendekatan penghasilan, hibah diakui dalam laba rugi
17 selama satu periode atau lebih.

18

19 15. Alasan yang mendukung pendekatan modal adalah
20 sebagai berikut:

21 (a) hibah pemerintah adalah alat pembiayaan dan
22 seharusnya diperlakukan demikian dalam laporan posisi
23 keuangan daripada diakui dalam laba rugi untuk saling
24 hapus dengan pos-pos biaya yang didanai hibah pemerintah.
25 Disebabkan diperkirakan tidak ada pembayaran kembali
26 yang diharapkan, hibah harus diakui di luar laba rugi.

27 (b) adalah tidak tepat untuk mengakui hibah pemerintah dalam
28 laba rugi, karena hibah tidak dihasilkan, tetapi merupakan
29 insentif yang diberikan pemerintah tanpa biaya terkait.

30

31 16. Argumentasi yang mendukung pendekatan penghasilan
32 adalah sebagai berikut:

33 (a) disebabkan hibah pemerintah merupakan penerimaan dari
34 suatu sumber selain dari pemegang saham, hibah tidak
35 boleh diakui secara langsung dalam ekuitas tetapi harus
36 diakui dalam laba rugi pada periode yang sesuai;

37 (b) hibah pemerintah jarang sekali tanpa alasan. Entitas
38 memperoleh hibah berdasarkan kepatuhan entitas terhadap

1 kondisi yang ditentukan dan memenuhi kewajiban yang
2 akan dihadapi. Oleh karena itu, hibah diakui dalam laba
3 rugi selama periode entitas mengakui sebagai beban atas
4 biaya terkait yang dimaksudkan akan dikompensasikan
5 dengan hibah; dan
6 (c) disebabkan pajak penghasilan dan pajak lain merupakan
7 beban, hal logis untuk memperlakukan hibah pemerintah,
8 yang merupakan perpanjangan dari kebijakan fiskal, dalam
9 laba rugi.

10
11 17. Hal yang sangat mendasar atas pendekatan penghasilan
12 adalah hibah pemerintah diakui dalam laba rugi dengan dasar
13 yang sistematis dan rasional selama periode entitas mengakui
14 sebagai beban atas biaya terkait yang dimaksudkan akan
15 dikompensasikan dengan hibah. Pengakuan hibah pemerintah
16 dalam laba rugi atas dasar penerimaan tidak sesuai dengan
17 asumsi akrual (lihat PSAK 1 (revisi 2009): *Penyajian Laporan*
18 *Keuangan*) dan hanya dapat diterima jika tidak terdapat dasar
19 lain untuk mengalokasikan hibah kepada periode selain periode
20 hibah diterima.

21
22 18. Umumnya, periode entitas mengakui biaya atau beban
23 yang terkait hibah pemerintah dengan mudah dapat diketahui.
24 Dengan demikian, hibah yang diakui berdasarkan pengakuan
25 beban tertentu, diakui dalam laba rugi pada periode yang sama
26 dengan beban tersebut. Demikian pula, hibah yang terkait
27 dengan aset yang dapat disusutkan biasanya diakui dalam
28 laba rugi selama periode dan dalam proporsi pengakuan beban
29 penyusutan aset tersebut.

30
31 19. Hibah yang terkait dengan aset yang tidak dapat
32 disusutkan mungkin juga mensyaratkan pemenuhan kewajiban
33 tertentu dan dengan demikian akan diakui dalam laba rugi
34 selama periode terjadinya biaya untuk memenuhi kewajiban.
35 Misalnya, hibah tanah mungkin mensyaratkan pendirian
36 bangunan di lokasi tersebut dan hal yang tepat untuk mengakui
37 hibah dalam laba rugi selama umur manfaat bangunan.

38

1 20. Hibah terkadang diterima sebagai bagian dari paket
2 bantuan keuangan atau bantuan fiskal dengan sejumlah kondisi
3 menyertainya. Dalam hal demikian, kehati-hatian diperlukan
4 dalam mengidentifikasi kondisi yang menimbulkan biaya
5 dan beban yang menentukan periode dimana bantuan akan
6 diperoleh. Hal yang mungkin tepat untuk mengalokasikan
7 sebagian dana hibah dengan suatu dasar tertentu dan bagian
8 lain dengan dasar yang lain.

9

10 **21. Hibah pemerintah yang menjadi piutang entitas**
11 *sebagai kompensasi atas beban atau kerugian yang telah*
12 *terjadi atau dalam rangka dukungan keuangan segera*
13 *kepada entitas tanpa beban terkait di masa yang akan datang,*
14 *diakui dalam laba rugi pada periode hibah tersebut menjadi*
15 *piutang.*

16

17 22. Dalam keadaan tertentu, hibah pemerintah dapat
18 diberikan dalam rangka dukungan keuangan segera kepada
19 entitas daripada sebagai insentif untuk melakukan pengeluaran
20 tertentu. Hibah tersebut mungkin terbatas pada entitas
21 tertentu dan mungkin tidak tersedia untuk seluruh pihak
22 dalam kelompok entitas penerima tersebut. Keadaan ini dapat
23 memberikan hak untuk mengakui hibah dalam laba rugi pada
24 periode entitas memenuhi kualifikasi untuk menerima hibah
25 tersebut, dengan pengungkapan yang cukup untuk memastikan
26 bahwa dampaknya dapat dipahami secara jelas.

27

28 23. Hibah pemerintah dapat menjadi piutang entitas
29 sebagai kompensasi atas beban atau kerugian yang telah terjadi
30 dalam periode sebelumnya. Hibah tersebut diakui dalam laba
31 rugi pada periode hibah menjadi piutang, dengan pengungkapan
32 untuk memastikan bahwa dampaknya dapat dipahami secara
33 jelas.

34

35 **Hibah Pemerintah Nonmoneter**

36

37 24. Hibah pemerintah dapat berbentuk penyerahan
38 aset nonmoneter, seperti tanah atau sumber daya lain, untuk

1 digunakan oleh entitas. Dalam keadaan ini adalah lazim untuk
2 menentukan nilai wajar aset nonmoneter dan mencatat hibah
3 dan aset pada nilai wajar. Sebagai alternatif terkadang dapat
4 saja mencatat aset dan hibah berdasarkan jumlah nominal.

5

6 **Penyajian Hibah yang Terkait dengan Aset**

7

8 *25. Hibah pemerintah yang terkait dengan aset, termasuk*
9 *hibah nonmoneter pada nilai wajar, disajikan dalam laporan*
10 *posisi keuangan, baik disajikan sebagai penghasilan*
11 *ditangguhkan atau hibah tersebut dicatat sebagai pengurang*
12 *nilai tercatat aset.*

13

14 26. Dua metode penyajian dalam laporan keuangan hibah
15 (atau bagian yang sesuai sebagai hibah) yang terkait dengan
16 aset dianggap sebagai alternatif yang dapat diterima.

17

18 27. Satu metode mengakui hibah sebagai penghasilan
19 tangguhan yang diakui dalam laba rugi dengan dasar sistematis
20 selama umur manfaat aset.

21

22 28. Metode lain mengakui hibah sebagai pengurang dalam
23 menghitung nilai tercatat aset. Hibah diakui dalam laba rugi
24 selama umur manfaat aset yang dapat disusutkan sebagai
25 pengurang beban penyusutan.

26

27 29. Pembelian aset dan penerimaan hibah terkait hibah
28 dapat menyebabkan pergerakan besar dalam arus kas entitas.
29 Untuk alasan ini dan untuk menunjukkan investasi bruto atas
30 aset, pergerakan tersebut sering diungkapkan sebagai pos
31 terpisah dalam laporan arus kas tanpa memperhatikan apakah
32 hibah tersebut dikurangkan atau tidak dari aset terkait untuk
33 tujuan penyajian laporan posisi keuangan.

34

35 **Penyajian Hibah yang Terkait dengan Penghasilan**

36

37 30. Hibah yang terkait dengan penghasilan terkadang
38 disajikan sebagai kredit dalam laporan laba rugi komprehensif,

1 baik secara terpisah atau dalam pos umum seperti “penghasilan
2 lain-lain”; atau alternatif lain, sebagai pengurang dalam beban
3 terkait.

4

5 31. Jika entitas menyajikan komponen laba rugi dalam
6 laporan laba rugi terpisah sebagaimana dijelaskan dalam PSAK
7 1 (revisi 2009): *Penyajian Laporan Keuangan* paragraf 79,
8 maka entitas menyajikan hibah terkait dengan penghasilan
9 sebagaimana disyaratkan paragraf 30 dalam laporan laba rugi
10 terpisah tersebut.

11

12 32. Pendukung metode pertama menyatakan bahwa tidak
13 tepat menyetorkan pos penghasilan dan beban serta pemisahan
14 hibah dari beban akan membantu untuk membandingkannya
15 dengan beban lain yang tidak dipengaruhi oleh hibah.
16 Pendukung metode kedua menyatakan bahwa beban mungkin
17 tidak akan ditanggung oleh entitas jika bantuan tidak tersedia
18 dan penyajian beban tanpa salinghapus dengan hibah akan
19 menyesatkan.

20

21 33. Kedua metode tersebut dianggap dapat diterima
22 untuk penyajian hibah yang terkait dengan penghasilan.
23 Pengungkapan hibah mungkin diperlukan untuk pemahaman
24 yang lebih tepat atas laporan keuangan. Pengungkapan
25 dampak hibah pada setiap pos penghasilan atau beban yang
26 disyaratkan untuk diungkapkan secara terpisah pada umumnya
27 diperlukan.

28

29 **Pembayaran Kembali Hibah Pemerintah**

30

31 34. *Hibah pemerintah yang ternyata harus dibayar*
32 *kembali diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi*
33 *(lihat PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi,*
34 *Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan).*
35 *Pembayaran kembali hibah yang terkait dengan penghasilan*
36 *diperhitungkan terlebih dahulu terhadap setiap saldo kredit*
37 *ditangguhkan yang belum diamortisasi terkait dengan hibah*
38 *tersebut. Jika pembayaran kembali melebihi saldo kredit*

1 *ditangguhkan, atau tidak ada lagi saldo kredit ditangguhkan,*
2 *maka pembayaran kembali diakui segera dalam laba rugi.*
3 *Pembayaran kembali hibah yang terkait dengan aset diakui*
4 *dengan meningkatkan nilai tercatat aset atau mengurangi*
5 *saldo penghasilan tangguhan dengan jumlah yang dibayar*
6 *kembali. Akumulasi penyusutan tambahan yang seharusnya*
7 *diakui dalam laba rugi seandainya hibah tidak ada, diakui*
8 *segera dalam laba rugi.*

9

10 35. Kondisi yang menimbulkan pembayaran kembali
11 hibah yang terkait dengan aset mungkin mensyaratkan untuk
12 memperhitungkan kemungkinan penurunan nilai atas jumlah
13 tercatat baru dari aset tersebut.

14

15 **BANTUAN PEMERINTAH**

16

17 36. Bantuan pemerintah yang dikecualikan dari definisi
18 hibah pemerintah di paragraf 03 merupakan beberapa bentuk
19 bantuan pemerintah yang tidak memiliki nilai yang memadai
20 bagi entitas dan transaksi dengan pemerintah yang tidak dapat
21 dibedakan dari transaksi perdagangan normal entitas.

22

23 37. Contoh bantuan yang tidak memiliki nilai yang
24 memadai adalah saran teknis atau saran pemasaran yang
25 diberikan secara cuma-cuma dan ketentuan penjaminan.
26 Contoh bantuan yang tidak dapat dibedakan dari transaksi
27 perdagangan normal entitas adalah kebijakan pengadaan
28 pemerintah yang menghasilkan sebagian penjualan entitas.
29 Keberadaan atas manfaat mungkin tidak diragukan lagi tetapi
30 setiap usaha untuk memisahkan aktivitas perdagangan dari
31 bantuan pemerintah sangat arbitrer.

32

33 38. Signifikansi atas manfaat pada contoh di atas akan
34 membuat pengungkapan sifat, luas dan lamanya bantuan
35 diperlukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan.

36

37

38

1 39. Dalam Pernyataan ini, bantuan pemerintah tidak
2 termasuk kebijakan infrastruktur melalui perbaikan jaringan
3 transportasi umum dan jaringan komunikasi serta penyediaan
4 fasilitas yang diperbaiki seperti pengairan atau penyaluran
5 air yang tersedia terus menerus untuk kepentingan seluruh
6 masyarakat setempat.

7

8 **PENGUNGKAPAN**

9

10 *40. Entitas mengungkapkan hal-hal berikut:*

- 11 *(a) kebijakan akuntansi yang digunakan untuk hibah*
12 *pemerintah, termasuk metode penyajian yang digunakan*
13 *dalam laporan keuangan;*
14 *(b) sifat dan luas hibah pemerintah yang diakui dalam*
15 *laporan keuangan dan indikasi bentuk lain dari bantuan*
16 *pemerintah yang mana entitas memperoleh manfaat*
17 *langsung atas bantuan tersebut; dan*
18 *(c) kondisi yang belum terpenuhi dan kontinjensi lain yang*
19 *melekat atas bantuan pemerintah yang telah diakui.*

20

21 **KETENTUAN TRANSISI**

22

23 *41. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk pertama*
24 *kali:*

- 25 *(a) mematuhi persyaratan pengungkapan yang sesuai;*
26 *dan*
27 *(b) memilih salah satu dari:*
28 *(i) menyesuaikan laporan keuangan entitas terhadap*
29 *perubahan kebijakan akuntansi sesuai dengan*
30 *PSAK 25 (revisi 2009): Kebijakan Akuntansi,*
31 *Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan;*
32 *atau*
33 *(ii) menerapkan ketentuan akuntansi dalam Pernyataan*
34 *ini hanya untuk hibah atau bagian dari hibah yang*
35 *menjadi tagihan atau harus dibayar kembali setelah*
36 *tanggal efektif Pernyataan ini.*

37

38

1 TANGGAL EFEKTIF

2

3 42. Entitas menerapkan Pernyataan ini untuk periode tahun
4 buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012. Penerapan
5 dini diperkenankan.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38